

**HASIL PENGAWASAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
PEMILU TAHUN 2019**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PENGANTAR

Salah satu syarat penting pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas adalah meluasnya partisipasi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. UUD Negara RI tahun 1945 dengan tegas menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara baik untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang jujur dan adil (*feer and fair election*). Selain itu, belajar dari penyelenggaraan Pemilu sebelumnya di berbagai daerah di Indonesia, masalah Daftar Pemilih menjadi salah satu materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil Pemilu. Saat ini KPU di 13 Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2019, secara keseluruhan penetapan telah dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, pelaksanaan penetapan untuk Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan masing-masing Kabupaten/kota antara tanggal 21 s.d. 23 Juli 2018.

Penyusunan DPSHP merupakan salah satu fase dalam rangkaian penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Tahun 2019, setelah ditetapkan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan amatan Pasal 28 PKPU 11 Tahun 2018 KPU Kabupaten/Kota Wajib mengumumkan DPSHP selama 7 Hari untuk mendapat tanggapan dan masukan masyarakat dan/atau peserta pemilu, sebelum dilakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

HASIL PENGAWASAN

Secara keseluruhan KPU Kabupaten/Kota Telah Menetapkan DPSHP, untuk DPSHP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

KABUPATEN/ KOTA	TANGGAL PENETAPAN DPSHP	JML KEC.	JML KEL. /DESA	JML TPS	DPSHP		
					L	P	TOTAL
KOTA PALU	22/07/2018	8	46	1.074	110.571	113.421	223.992
KAB. POSO	22/07/2018	19	170	766	79.056	75.981	155.037
KAB. MOROWALI	22/07/2018	9	133	411	50.307	45.439	95.746
KAB. PARIGI MOUTONG	22/07/2018	23	283	1.337	155.982	149.329	305.311
KAB. BANGGAI KEPULAUAN	22/07/2018	12	144	397	35.914	35.929	71.843
KAB. SIGI	23/07/2018	15	176	853	77.502	74.785	152.287
KAB. BANGGAI	22/07/2018	23	337	1.158	130.174	126.824	256.998
KAB. BUOL	22/07/2018	11	115	430	51.307	48.340	99.647
KAB. BANGGAI LAUT	22/07/2018	7	66	212	22.427	22.143	44.570
KAB. TOJO UNA-UNA	22/07/2018	12	146	514	55.777	52.931	108.708
KAB. TOLITOLI	22/07/2018	10	109	746	77.674	74.488	152.162
KAB. MOROWALI UTARA	21/07/2018	10	125	385	41.725	39.015	80.740
KAB. DONGGALA	22/07/2018	16	167	857	104.884	99.467	204.351
JUMLAH		175	2.017	9.140	993.300	958.092	1.951.392

Selanjutnya DPSHP yang ditetapkan dibandingkan dengan DPS, dari hasil analisis terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang mengalami pengurangan jumlah pemilih sebagai berikut :

KABUPATEN/KOTA	DPS			DPSHP			DPS vs DPSHP
	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	
KOTA PALU	116.413	119.145	235.558	110.571	113.421	223.992	-11.566
KAB. POSO	79.419	76.263	155.682	79.056	75.981	155.037	-645
KAB. BANGKEP	42.332	41.193	83.525	35.914	35.929	71.843	-11.682
KAB. SIGI	85.312	82.086	167.398	77.502	74.785	152.287	-15.111
KAB. BUOL	51.423	48.458	99.881	51.307	48.340	99.647	-234
KAB. TOLITOLI	81.472	78.010	159.482	77.674	74.488	152.162	-7.320
KAB. MORUT	43.080	40.247	83.327	41.725	39.015	80.740	-2.587

Sedangkan 6 (enam) Kabupaten mengalami penambahan jumlah pemilih, sebagai berikut :

KABUPATEN	DPS			DPSHP			DPS vs DPSHP
	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	
KAB. MOROWALI	47.259	43.728	90.987	50.307	45.439	95.746	4.759
KAB. PARIGI MOUTONG	155.930	149.351	305.281	155.982	149.329	305.311	30
KAB. BANGGAI	124.818	119.279	244.097	130.174	126.824	256.998	12.901
KAB. BANGGAI LAUT	22.396	22.117	44.513	22.427	22.143	44.570	57
KAB. TOJO UNA-UNA	54.877	52.054	106.931	55.777	52.931	108.708	1.777
KAB. DONGGALA	103.526	98.193	201.719	104.884	99.467	204.351	2.632

Kemudian jumlah pemilih yang dicoret dari DPS berdasarkan penelitian KPU dan masukan masyarakat saat penetapan DPSHP berjumlah 98.619, secara rinci sebagaimana dalam tabel berikut :

KABUPATEN/KOTA	DPSHP			JUMLAH PEMILIH YANG DICORET DARI DPS*
	L	P	TOTAL	
KOTA PALU	110.571	113.421	223.992	11.566
KAB. POSO	79.056	75.981	155.037	2.581
KAB. MOROWALI	50.307	45.439	95.746	2.794
KAB. PARIGI MOUTONG	155.982	149.329	305.311	6.344
KAB. BANGGAI KEPULAUAN	35.914	35.929	71.843	11.682
KAB. SIGI	77.502	74.785	152.287	15.890
KAB. BANGGAI	130.174	126.824	256.998	30.576
KAB. BUOL	51.307	48.340	99.647	691
KAB. BANGGAI LAUT	22.427	22.143	44.570	908
KAB. TOJO UNA-UNA	55.777	52.931	108.708	1.909
KAB. TOLITOLI	77.674	74.488	152.162	7.320
KAB. MOROWALI UTARA	41.725	39.015	80.740	2.587
KAB. DONGGALA	104.884	99.467	204.351	3.771
JUMLAH	993.300	958.092	1.951.392	98.619

* Berdasarkan Penelitian KPU dan Masukan Masyarakat Saat Penetapan DPSHP

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (9) PKPU 11 Tahun 2018, disebutkan “KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPSHP dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *Portable Document Format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada Peserta Pemilu tingkat daerah kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapat masukan dan tanggapan”. Terkait dengan kewajiban tersebut sampai saat ini masih terdapat beberapa KPU Kabupaten yang belum menyampaikan salinan DPSHP Kepada Peserta Pemilu dan/atau Pengawas Pemilu, yaitu :

- 1. Kabupaten Parigi Moutong;**
- 2. Kabupaten Banggai;**
- 3. Kabupaten Buol; dan**

Pengawas Pemilu juga melakukan pengawasan pengumuman DPSHP pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat, berdasarkan hasil pemantauan pengawas pemilu, pertanggal 26 Juli 2018 Pukul 16.30 Wita, semua Kabupaten/Kota telah mengumumkan DPSHP, namun terdapat 1 (satu) Kabupaten yang **belum** mengumumkan, yaitu :

- 1. Kabupaten Banggai.**

Secara keseluruhan berdasarkan hasil pengawasan terhadap terhadap Penyusunan DPS sampai pada DPSHP, terdapat beberapa catatan Pengawas Pemilu baik yang telah disampaikan dan/atau beberapa catatan yang akan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang merupakan masukan untuk perbaikan daftar pemilih sebelum ditetapkan menjadi DPT, sebagai berikut :

- Hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Poso, masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam data DPS dan masih terdapat data pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam data DPS. selanjutnya dalam Berita Acara Pleno DPSHP tingkat Kecamatan ada 5

kecamatan yang tidak menyebutkan jumlah DPSHP pada Berita Acara Pleno DPSHP tingkat Kecamatan.

- Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah merekomendasikan kepada KPU Kab. Banggai Kepulauan agar memasukan 298 Pemilih yang telah memenuhi syarat berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penetapan DPSHP ditingkat kecamatan Bulagi Selatan Untuk di masukan dalam Rekapitulasi DPSHP.
- Hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Banggai, pada DPSHP terdapat pemilih yang dicoret dari DPS atau TMS, sebagian merupakan pemilih yang pindah TPS namun dikategorikan TMS, data tersebut selanjutnya akan diperbaiki dalam DPSHP perbaikan akhir sebelum ditetapkan menjadi DPT.
- Hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Buol, di Kecamatan gadung terdapat pemilih di bawah umur yang masih duduk di sekolah dasar sudah masuk dalam DPS, berdasarkan hasil penelusuran kartu Keluarga dengan Akta Lahir yang bersangkutan terdapat kekeliruan pada tahun kelahiran, dan peristiwa tersebut telah diselesaikan pada rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan, Pada saat Penetapan DPSHP di tingkat kabupaten, PPK Kecamatan Gadung keliru dalam memasukan jumlah DPS untuk diproses ke DPSHP, Kesalahan tersebut juga telah dilakukan perbaikan pada saat itu juga. Dan berdasarkan hasil pengawasan dalam DPS masih terdapat Data Ganda, Pindah Domisilih, Meninggal (Tidak Memenuhi Syarat).
- Hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Morowali Utara, Pada saat pengumuman DPS, masih terdapat Pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar dan Pemilih tidak memenuhi syarat namun terdaftar.
- Hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Donggala, Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPSHP kab. Donggalad dilaksanakan pada hari Minggu 22 Juli 2018. Setelah pembacaan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Donggala terdapat perbedaan hasil rekapitulasi data pemilih yg di bacakan dengan hasil rekapitulasi yang ada di tingkat Kecamatan yakni terdapat beberapa Kecamatan yg berbeda hasil rekap di tingkat Kecamatan dengan yg di bacakan pada saat penetapan DPSHP di tingkat kabupaten

donggala. Berdasarkan peristiwa tersebut, KPU Kabupaten bersama PPK melakukan pencermatan kembali untuk mensinkronkan data tersebut, namun dikarenakan jumlah data pemilih yg berbeda tersebut jumlahnya tidak sedikit dan waktu yang terbatas untuk melakukan pencermatan maka KPU Kab. Donggala menetapkan hasil DPSHP dengan catatan melakukan perbaikan data kembali.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Kol. Sugiono No. 12 Palu , Telepon : (0451) 452301
Laman : www.sulteng.bawaslu.go.id

Kamis, 26 Juli 2018